

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN

(Studi Kasus Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar)

Dwi Rahma¹

dwirahma953@gmail.com

¹Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

Workers or laborers have rights that are protected by law. Their rights are occupational safety and health which become the focus discussion in this paper. In order to ensure the work accident insurance program (JKK) run properly and effectively, it is necessary to have a good accounting system. The purpose of this program is to ensure that workers who experience work accidents can return to work without facing the risk of being terminated due to their accident. The work accident insurance claim system has a close relationship with the cash disbursement accounting system because the claim is a claim for recognition that must be paid by the insurance company, so that the insured's rights are fulfilled in accordance with the agreement agreed in the insurance. The purpose of this study is to find out: 1. Procedures in claiming work accident insurance (JKK). 2. The accounting system in work accident insurance claims (JKK). 3. Evaluation of the work accident insurance claim accounting system (JKK) at BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar Branch.

Keywords: *Work Accident Insurance, Payment Systems and Procedures, Internal Control.*

ABSTRAK

Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi focus bahasan di dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Agar program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dapat berjalan dengan baik dan efektif perlu adanya system akuntansi yang baik. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecelakaan yang dialaminya. Adapun system akuntansi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja memiliki hubungan yang erat dengan sistem akuntansi pengeluaran kas, karena klaim merupakan tuntutan pengakuan yang harus dibayar pertanggung kepada tertanggung, agar hak tertanggung terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Prosedur dalam klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK). 2. Mengetahui system akuntansi dalam klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK). 3. Mengetahui evaluasi terhadap system akuntansi klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar.

Kata Kunci: *Jaminan Kecelakaan Kerja, Sistem Dan Prosedur Pembayaran, Pengendalian Intern.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap bangsa dan negara, namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai

dengan tujuan dan filosofi buat apa negara itu didirikan. Masalah ketenagakerjaan adalah hal yang berkaitan dengan hajat hidup manusia seutuhnya. Dengan demikian negara wajib mensejahterakan warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 yang tujuannya

untuk mensejahterakan rakyat dengan mengembangkan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Salah satu bentuk untuk menjadi negara kesejahteraan adalah dengan menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Asuransi sosial secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam sejarahnya, salah satu manfaat asuransi sosial adalah memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Implikasi dari perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada tenaga kerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Sehingga manfaat jangka panjangnya tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja dan pengusaha tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. Ada beberapa program jaminan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan SDA yang melimpah dan kultur perekonomian yang berkembang dari tahun ke tahun, sehingga banyak bermunculan industri kecil hingga perindustrian skala besar. Hal ini menjadikan banyak perusahaan memerlukan karyawan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Salah satu hal yang berpengaruh pada operasional adalah aspek Sumber Daya Manusia atau karyawan, dimana keberlangsungan kegiatan perusahaan tergantung pada

kinerja karyawan. Oleh karena itu perusahaan wajib memberikan fasilitas dan tunjangan kepada karyawannya dengan mendaftarkannya pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut juga diatur dalam peraturan kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 yang berisi tentang "penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sector usaha jasa konstruksi."

Nita Ayu Krisnawati (2020) memberikan bukti empiris bahwa banyak perusahaan yang melakukan penyimpangan prosedur pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri setelah melakukan klaim sehingga menyebabkan terjadinya hutang pada pihak provider yang dapat mengganggu arus kas operasional di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian intern yang efektif dan efisien untuk menjaga kestabilan kas pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri. Pengendalian intern ini merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan berperan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga dapat merugikan perusahaan. Pengendalian intern dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja dalam suatu perusahaan tentang pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem dan prosedur klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar.

Permasalahan

Dalam lingkup BPJS Ketenagakerjaan tentunya bertujuan untuk mengumpulkan iuran dari segenap peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menjamin

kesehatan pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja. Tetapi faktanya ratusan perusahaan makro maupun mikro lambat membayar iuran. Selain itu Mekanisme pelaksanaan fasilitas jaminan kecelakaan kerja harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tidak mengganggu sistem pengendalian intern di kedua pihak. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan berperan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga dapat merugikan perusahaan, karena dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dalam suatu perusahaan tentang pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan system dan prosedur dalam pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur dalam klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkaitan dengan system pengendalian intern pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar.
2. Mengetahui system akuntansi dalam pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan system akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh system yang ada, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

b. System Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

System akuntansi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memiliki hubungan yang sangat erat dengan system pengeluaran kas. Klaim merupakan salah satu pengeluaran kas karena tuntutan pengakuan yang harus dibayar penanggung kepada tertanggung, agar hak tertanggung terpenuhi sesuai dengan yang telah disepakati di dalam asuransi.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar Jln. Sakti Lubis No. 5, Pematangsiantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai sistim dan prosedur pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar, maka diperoleh informasi melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan karyawan, mengenai sistim dan prosedur pelaksanaan pembayaran klaim jaminan JKK sebagai berikut:

a. Sistem dan prosedur pembayaran klaim Kecelakaan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Pematangsiantar

1. Peserta mengajukan permintaan jaminan kecelakaan di bagian CSO memakai formulir KK2 dan dokumen pendukung seperti, KTP, KK, dan kartu peserta jaminan.
 2. Kemudian kelengkapan dokumen akan diteliti serta formulir yang telah diisi diotorisasi sebelum oleh Kepala Bidang Pelayanan untuk dibuatkan dokumen tanda terima
 3. Semua dokumen lengkap akan diajukan kepada bagian verifikasi jaminan
 4. Bagian CSO menganalisis di sistim computer dan mencatat pada general ladge, kemudian ditetapkan jumlah jaminan yang akan diberikan melalui persetujuan oleh kepala bagian pelayanan
 5. Kemudian dokumen penetapan jaminan kecelakaan kerja dibuat rangkap 2 dan diserahkan ke bagian verifikasi akuntansi
 6. Setelah bagian akuntansi menerima dikumen dari bagian jaminan verifikasi jaminan untuk dilihat kembali, maka akan diterbitkan voucher jaminan rangkap 2 dan menerbitkan bukti pembayaran jaminana rangkap 2
 7. Kemudian dokumen tersebut diserahkan ke bagian keuangan pembayaran tunai. Setelah itu semua dokumen harus diperiksa kemnali sesuai dengan nominal yang ditetapkan dan diotorisasi kepala bagian keuangan
 8. Voucher jaminan lembar 1, dokumen jaminan dan tanda terima diarsip permanen berdasarkan tanggal
 9. Lembar voucher jaminan, bukti pembayaran jaminan, penetapan jaminan kecelakaan kerja yang dirangkap satunya, berdasarkan cek diserahkan ke bagian kasir bayar tunai. Bagian kasir bertugas untuk mencocokkan semua dokumen dan menyerahkan uang beserta voucher jaminan 2 kepada tenaga kerja/peserta. Dokumen voucher jaminan 2, bukti pembayaran 2, penetapan jaminan, nota transfer diserahkan ke bagian kasir pembayaran transfer
 10. Setelah kasir pembayaran transfer menerima dokumen, mereka mencocokkan data kemudian uang ke nomor rekening bersamaan dengan menyerahkan voucher jaminan cek, bukti pembayaran jaminan, dan penetapan jaminan kecelakaan pekerja
 11. Semua bukti pembayaran dan dikumen pekerja akan diarsip permanen berdasarkan nomor kemudian dicocokkan dengan bagian keuangan.
- b. Dokumen yang digunakan dalam prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan**
1. Formulir pengajuan kecelakaan kerja
 2. Penetapan jaminan
 3. Kwitansi jaminan
 4. Cek
- c. Catatan akuntansi yang digunakan dalam system dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan**
1. Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal pengeluaran kas yang digunakan meruoakan daftar harian kas. Daftra harian kas tersebut dibuat oleh kasir, kemudian ditandatangani oleh kepala bidang pelayanan dan divalidasi oleh bidang keuangan.
 2. Register Cek
Register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek/bilyet giro. Laporan pemakai bilyet gito berfungsi untuk mencatat pemakaian bilyet giro perusahaan yang telah dikeluarkan untuk pembayaran klaim kecelakaan.
- d. Fungsi yang terkait dengan system dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan**
1. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas

Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas adalah fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek, yaitu verifikasi jaminan berdasarkan berkas-berkas pengajuan klaim kecelakaan yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan UU yang berlaku. Fungsi berifikasi jaminan memberikan perintah atau dokumen yang digunakan untuk mwmbuatn voucher jaminan, bukti pembayaran, dan cek.

2. Fungsi Kas

Fungsi yang bertanggungjawab dalam melakukan fungsi kas adalah bagian keuangan. Fungsi kas bertujuan untuk memeriksa dokumen dari akuntansi kemudian membuat cek atau nota transfer jika jumlah uang ditransfer kemudian diotorisasi oleh bidang keuangan.

3. Fungsi Akuntansi

Fungsi yang bertanggungjawan dalam melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas ke dalam jurnal, mebuat voucher, dan bukti pembayaran adalah bagian akuntansi yaitu penata madya keuangan.

4. Fungsi Pemeriksaan Intern

Fungsi yang melakukan perhitungan kas secara periodic dan mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi adalah staff bidang keuangan dan kepala kantor cabang.

e. Bagian yang terkait pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar adalah

1. CSO (Costumer Service Officer)
2. Verifikasi Jaminan
3. Verifikasi Akuntansi
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Kasir

f. System pengendalian intern pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar

System pengendalian internal Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar sama seperti organisasi lainnya, yaitu berkaitan

dengan struktur organisasi, system otorisasi, dan praktik yang dilakukan di kantor. Setiap Jobdesk sudah sesuai dengan struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/092019 tentang jobdesk kantor wilayah dan cabang. Sehingga tidak ada pekerjaan yang dikerjakan tidak seharusnya. Kemudian otorisasinya jelas, hanya pejabat yang berwenang yang boleh memverifikasi suatu dokumen. Misalnya, dalam hal penetapan jaminan kecelakaan kerja hanya bisa ditandatangani oleh kepala bagian pelayanan. Selain kepala bagian pelayanan tidak ada yang bisa menandatangani berkas tersebut. BPJS Ketenagakerjaa melalui seleksi yang ketat dan melakukan diklat pra tugas sebelum masuk di dunia pekerjaan. Selain itu, karyawannya juga harus mengikuti pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Peneliti menyimpulkan bahwa system dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian intern. Hal tersebut terbukti dengan hasil sebagai berikut:

1. System akuntansi pembayaran JKK dilakukan oleh setiap bidang yang telah ditentukan yaitu CSO, verifikasi jaminan dan akuntansi, keuangan dan kasir.
2. Dokumen yang digunakan yaitu formulir pengajuan klaim, penetapan jaminan, bukti pembayaran, voucher, nota transfer, dan cek
3. System pengendalian intern system dan prosedur pembayaran klaim jaminan kecelakaan antara lain:
 - a) Struktur organisasi yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang

Pematangsiantar sudah baik karena memisahkan tanggungjawab secara tegas dengan mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh peraturan direksi.

- b) Praktik yang sehat dijalankan dalam pelaksanaan tugas sesuai wewenang tiap bagian.

KETERBATASAN

1. System rolling jabatan yang dilakukan kurang efisien untuk dilakukan karena dapat menyebabkan ketidakpahaman oleh karyawan sehingga menyebabkan kinerja yang kurang maksimal karena harus memahami jobdesk yang terus berubah.
2. Penambahan dokumen pendukung, berupa bukti penerimaan santunan kepada pekerja yang mengalami musibah berisikan tentang jaminan atas kecelakaan kerja dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, uang santunan belum masuk ke rekening korban/ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya. Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Cendy Fadhilah, Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Social (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palembang
- Chicilia, Analisis System Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Aparatur Sipil Negara Pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Manado, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern)

Hafizah Indriyanti, Tinjauan Atas Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>

Luthfi J. Kurniawan. Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Malang: Intramas Publishing. 2015.

Nurlinda. Analisis Sistem JHT Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa (Jurnal Penelitian Akuntansi). 2019.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/092019 Tentang Jobscription Kantor Wilayah Dan Cabang

Riski Novera Yenita. Higiene Industri Yogyakarta: Deepublish. 2015

Riswan Dwi Djatmiko, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Yogyakarta: Deepublish. 2016.

Safa'at, R. Advokasi dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Cetakan ke-2. 2016.